

Peran Kepala Sekolah dalam Menerapkan Kebijakan Inklusi di Lingkungan SDIT Salsabila 3 Banguntapan

Yunti Aminatuzzuhriyah¹, Nelly Setia Wati², Pandi Kuswoyo³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Keywords:

Pendidikan Inklusif
Kebijakan Inklusi
Kepala Sekolah
Lingkungan Belajar
Keadilan Pendidikan

ABSTRACT

Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, tanpa adanya diskriminasi. Pendekatan ini menekankan pemenuhan kebutuhan individual dalam lingkungan pembelajaran reguler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 Banguntapan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 Banguntapan didasarkan pada visi Islami yang mengedepankan nilai keadilan dan kesetaraan. Kepala sekolah berperan sentral dalam merancang visi inklusi, membimbing tenaga pendidik, menyediakan fasilitas yang memadai, serta membangun kolaborasi dengan komunitas sekolah. Selain itu, kepala sekolah turut mendukung pengembangan peserta didik dan mengurangi stigma sosial di lingkungan sekolah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yunti Aminatuzzuhriyah

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta, 55281.

Email: yuntiaminaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusi kerap dipahami sebagai upaya untuk membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya memenuhi hak dasar setiap anak terhadap pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan menghilangkan hambatan diskriminasi dalam proses belajar mengajar [1]. Salah satu perbedaan antara pendekatan inklusi dan mainstreaming dapat dilihat dari cara kebutuhan belajar siswa dipenuhi. Dalam kelas inklusif, semua siswa belajar bersama tanpa segregasi, dan guru menyesuaikan metode pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan individu secara beragam. Sebaliknya, dalam pendekatan mainstreaming cenderung menempatkan siswa berkebutuhan khusus dalam kurikulum umum tanpa adaptasi yang memadai, dan mereka kerap dipisahkan dari kelas untuk menerima layanan tambahan secara terpisah [2].

Sistem inklusi tidak hanya mencakup siswa dengan keterbatasan fisik atau mental seperti disabilitas sensorik, gangguan motorik, atau autisme, tetapi juga mengacu pada upaya menyeluruh untuk mengakomodasi semua kelompok yang terpinggirkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat [2]. Meskipun proses pembelajaran di kelas inklusi secara umum tidak berbeda drastis dengan kelas reguler, sistem ini menekankan pada strategi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan individu siswa serta penerapan prinsip non-diskriminasi [3];[4].

Untuk mewujudkan sistem inklusi yang efektif, diperlukan kepemimpinan sekolah yang responsif [5]. Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam mengarahkan implementasi kebijakan ini, mulai dari membangun visi inklusif, menjalankan fungsi manajerial dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya, hingga melakukan supervisi terhadap kinerja guru serta efektivitas pembelajaran inklusif [6]. Dalam menjalankan peran tersebut, kepala sekolah juga bertanggung jawab memberikan bimbingan personal, menyelenggarakan pelatihan bagi guru, serta mendorong penggunaan metode pembelajaran yang adaptif dan inovatif [7].

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti guru, staf sekolah, orang tua, dan komunitas menjadi kunci dalam membangun budaya inklusi yang kuat. Komunikasi yang efektif antara sekolah dan keluarga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan peserta didik serta memperkuat dukungan emosional dan sosial mereka di lingkungan sekolah [5]. Dalam Praktiknya, Pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, banyak guru masih mengalami kesulitan dalam menangani siswa berkebutuhan khusus karena keterbatasan pengetahuan dan pelatihan tentang pendekatan inklusi [8]. Selain itu, masih ditemukan kesenjangan antara visi kebijakan inklusi dan pelaksanaannya di tingkat sekolah, di mana adaptasi kurikulum dan dukungan administratif belum berjalan optimal [9].

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran kepala sekolah dalam konteks pendidikan inklusif. Pasaribu dkk. Meneliti peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah terpencil dan menemukan bahwa kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun terkendala sumber daya dan infrastruktur yang terbatas [10]. Rismita dkk. Menyoroti peran kepemimpinan intruksional kepala sekolah dalam mengkoordinasikan pendidikan inklusif, namun hasilnya menunjukkan bahwa minimnya pelatihan bagi guru menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembelajaran yang adaptif [11]. Sementara itu, penelitian Fuaddah dkk menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan yang toleran dan moderat secara keagamaan, tetapi belum menyoroti implementasi kebijakan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus secara spesifik [12].

Berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa studi tentang peran kepala sekolah dalam pendidikan inklusi sudah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat celah empiris yaitu belum secara mendalam membahas strategi kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan inklusi di tingkat sekolah dasar, belum banyak kajian yang menguraikan keterlibatan kepala sekolah dalam membangun komunikasi kolaboratif antara guru dan wali murid dalam konteks inklusi, dan masih terbatas penelitian yang menggambarkan bagaimana kebijakan inklusi diterjemahkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah berbasis islam seperti SDIT.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada peran kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 Banguntapan, serta bagaimana kepala sekolah mengelola tantangan pelaksanaan kebijakan inklusi di lingkungan belajar yang heterogen. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi kepemimpinan inklusif yang efektif dalam konteks sekolah dasar Islam, serta memperkaya literatur tentang praktik kepemimpinan pendidikan inklusif di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis [13]. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang akan diteliti, yaitu untuk memahami peran kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan inklusi di lingkungan sekolah SDIT Salsabila 3 Banguntapan. Data kualitatif didapatkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan sekolah yang relevan. Kemudian di dokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan atau transkrip [14].

Teknik pengumpulan data dilakukan di lingkungan alami (natural setting) dengan menggunakan sumber data primer. Observasi dilakukan langsung di SDIT Salsabila 3 Banguntapan. Observasi difokuskan pada interaksi antara guru dan siswa berkebutuhan khusus, dukungan sarana dan prasarana, suasana pembelajaran inklusif, serta komunikasi antara guru dengan wali murid sebagai bagian dari kolaborasi pendidikan. Interaksi guru dengan wali murid diamati untuk memahami sejauh mana komunikasi dan kerja sama dilakukan dalam mendukung perkembangan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan satu guru kelas. Akan tetapi, Wawancara ini lebih difokuskan pada kepala sekolah, karena fokus yang dijadikan penelitian dan dianggap paling mengetahui secara mendalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan inklusi di sekolah. Kepala sekolah juga merupakan otoritas utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif, sehingga menjadi sumber informasi yang paling relevan dan kredibel bagi tujuan penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian [15]. Sebagai pelengkap data lapangan, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung yang memuat kebijakan inklusi sekolah [16].

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, melakukan member check kepada informan untuk memastikan keakuratan data, serta menerapkan audit trail untuk menjaga transparansi proses penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Latar Belakang kebijakan inklusi SDIT Salsabila 3

SDIT Salsabila 3 Banguntapan didirikan pada tahun 2005 sebagai sekolah dasar berbasis nilai-nilai Islam. Sejak awal, sekolah ini telah mengusung pandangan bahwa setiap anak memiliki potensi istimewa yang perlu dikembangkan secara optimal. Pandangan ini mencerminkan semangat inklusif meskipun pada saat itu istilah “pendidikan inklusi” belum populer digunakan.

Penerapan kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 semakin menguat setelah adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mendorong semua lembaga pendidikan menerapkan pendekatan inklusi dalam proses belajar mengajar. Di tingkat kabupaten, sekolah-sekolah yang dinilai siap bahkan mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai sekolah inklusi. Meskipun SDIT Salsabila 3 hingga saat ini belum memiliki SK resmi tersebut, praktik inklusif telah dilaksanakan sejak awal pendiriannya.

Visi inklusi di sekolah ini didukung oleh prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab mencari ilmu bagi seluruh umat tanpa diskriminasi. Dalam perspektif epistemologi Islam, pendidikan inklusif merupakan proses pembelajaran yang berlangsung seumur hidup, yang menjamin akses bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus [17].

Islam menekankan nilai pendidikan inklusif yang tidak merugikan satu sama lain. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap keberagaman, pencarian ilmu oleh laki-laki dan perempuan, serta pengembangan fitrah manusia menjadi landasan filosofis bagi pendekatan ini [18]. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah manusia, sehingga dapat menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berilmu. [19]. Kepala sekolah SDIT Salsabila 3 memandang bahwa pendekatan inklusi selaras dengan nilai dasar sekolah dan ajaran Islam. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan kebijakan inklusi secara bertahap dan konsisten, meskipun tanpa penetapan formal sebagai sekolah inklusi.

Sekolah ini dalam praktiknya mengembangkan konsep inklusi yang disebut sebagai happy school, sebuah pendekatan yang mengutamakan kebahagiaan, kenyamanan, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Sejak awal berdiri, SDIT Salsabila 3 menerapkan metode BCM (bermain, bercerita, dan menyanyi) untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO dalam KTT Transformasi Pendidikan 2022, yang menempatkan kebahagiaan siswa sebagai inti dari reformasi pendidikan.

Konsep happy school di SDIT Salsabila 3 mencakup delapan elemen utama. Pertama, atmosfer positif yang menciptakan lingkungan ramah dan penuh kasih sayang. Kedua, kurikulum yang menyenangkan, yang relevan dengan kehidupan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Ketiga, partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kolaboratif. Keempat, dukungan emosional dan sosial yang membantu siswa mengatasi tantangan pribadi dan akademik.

Kelima, penghargaan dan pengakuan, yang diberikan secara konsisten untuk membangun kepercayaan diri siswa. Keenam, fasilitas yang memadai, meskipun tidak mewah, tetapi aman, bersih, dan mendukung proses belajar. Ketujuh, pendidikan karakter, yang menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Kedelapan, kolaborasi dengan orang tua, yang diwujudkan melalui program FORSIGO (Forum Silaturahmi Guru dan Orang Tua) sebagai ruang komunikasi dan dukungan terhadap perkembangan siswa.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian implementasi Kebijakan Inklusi di SDIT Salsabila 3

Aspek Utama	Temuan lapangan	Implikasi dan Dampak
Latar Belakang Kebijakan	Berdiri sejak 2005 dengan dasar nilai-nilai Islam dan konsep Happy School; sudah menerapkan praktik inklusi meski belum memiliki SK formal.	Nilai Islam menjadi dasar filosofis inklusi; sekolah membangun budaya belajar yang menyenangkan dan ramah semua anak.
Peran kepala Sekolah	Kepala sekolah berperan sebagai pionir, pembuka forum, motivator, dan fasilitator; menggerakkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam penerapan inklusi.	Kepemimpinan transformasional memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap pendidikan inklusif.
Tantangan Implementasi	Resistensi sebagian orang tua terhadap kehadiran siswa ABK; keterbatasan sarana dan pelatihan guru.	Sekolah melakukan sosialisasi, pelatihan guru, dan pendekatan persuasif berbasis nilai Islam untuk membangun penerimaan.

Aspek Utama	Temuan lapangan	Implikasi dan Dampak
Evaluasi dan dampak	Evaluasi dilakukan melalui yang namanya dauroh pekanan, refleksi semesteran, dan Monitoring tahunan.	Siswa ABK meningkat dalam kemandirian, percaya diri, dan kemampuan social; tercipta iklim sekolah yang hangat dan kolaboratif.

3.2. Peran Kepala Sekolah dalam Menerapkan Kebijakan Inklusi

Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas [20].

Kepala Sekolah SDIT Salsabila 3 Banguntapan memegang peran krusial dalam memastikan implementasi kebijakan inklusi berjalan efektif. Keberhasilan program pendidikan inklusif sangat bergantung pada optimalisasi manajemen sekolah secara menyeluruh. Manajemen tersebut mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi guna menjamin bahwa seluruh elemen kebijakan inklusi terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. [21]. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, berikut ini adalah peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan inklusi di sekolah tersebut:

3.2.1. Kepala sekolah sebagai pionir

Kepala sekolah di SDIT Salsabila 3 sebagai pionir atau penggerak memimpin inisiatif kebijakan inklusi dengan memberikan pemahaman kepada guru, komite sekolah, dan orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan inklusi. Ia menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang, sesuai dengan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyasa, yang dikutip oleh Muslimin dan muqowim [22], Kepemimpinan kepala sekolah adalah upaya kepala sekolah untuk memotivasi, membimbing, mengarahkan, dan mengajak guru, staf, siswa, orang tua, serta pihak lain untuk bekerja sama. Kepala sekolah juga memiliki peran penting dalam membantu guru meningkatkan kinerjanya dalam merencanakan program terkait kebijakan inklusi.

3.2.2. Kepala sekolah sebagai pembuka forum

Kerberlanjutan pendidikan inklusif di SDIT Salsabila 3 sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen sekolah dan komunitas. Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, terungkap bahwa kepala sekolah secara sistematis membangun sinergi dengan guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya merupakan tanggung jawab internal sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan eksternal, sebagaimana ditegaskan oleh Booth dan Ainscow, bahwa kolaborasi lintas sektor adalah fondasi utama dalam mengembangkan sekolah inklusif [23].

Sebagai pemimpin, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk memberikan arahan dan pengawasan, memotivasi tenaga kependidikan, membangun komunikasi dua arah yang efektif serta mendistribusikan tugas dengan baik [24]. Kepala sekolah membangun dukungan dari berbagai pihak berperan aktif dalam mengupayakan penerimaan kebijakan inklusi oleh semua pihak, termasuk guru, staf, dan orang tua siswa. Sosialisasi dilakukan secara rutin untuk menyampaikan tujuan, manfaat, dan strategi implementasi kebijakan inklusi. Agar terciptanya kesepakatan yang menyenangkan bagi semua pihak atau warga sekolah SDIT Salsabila 3.

3.2.3. Kepala sekolah sebagai motivator

Kepala sekolah memegang peranan krusial dalam dunia pendidikan sebagai pemberi motivasi bagi guru dan siswa. Sebagai pemimpin, tugasnya adalah menciptakan suasana kerja yang positif dan mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan semangat dan kinerja pengajar [25]. Kepala sekolah di SDIT Salsabila 3 menyediakan dukungan moral dan teknis kepada guru melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan forum diskusi. Forum ini memungkinkan guru berbagi pengalaman dan strategi inovatif dalam menangani siswa.

Kepala sekolah sebagai motivator mengacu pada tipe kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi karyawan untuk mengutamakan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi melalui dukungan yang konsisten dan keterlibatan aktif [26].

3.2.3. Kepala sekolah sebagai fasilitator

Kepala sekolah sebagai fasilitator memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung terwujudnya perubahan dan perbaikan berkelanjutan dalam lingkungan sekolah. Glickman menjelaskan bahwa peran fasilitator melibatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memfasilitasi komunikasi antarwarga sekolah, serta membimbing guru untuk mengembangkan potensi dan praktik pembelajaran yang efektif. Kepala sekolah juga dituntut untuk mampu memberdayakan seluruh komponen sekolah agar berpartisipasi aktif dalam proses perubahan, memantau kemajuan, mengatasi hambatan, serta memberikan penguatan moral dan material atas setiap pencapaian. [27]

Kepala sekolah di SDIT Salsabila 3 sebagai Fasilitator dan Penyedia Sarana Pendukung belum memiliki fasilitas fisik khusus. Meskipun demikian, kepala sekolah memprioritaskan lewat penyediaan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pendekatan pengajaran individual untuk siswa dengan kebutuhan belajar khusus. Kemudian juga menyediakan forum komunikasi dengan orang tua hal ini juga menjadi bagian penting dari upaya kepala sekolah sebagai fasilitator.

3.3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Inklusi

Penerapan pendidikan inklusif tidak terlepas dari berbagai tantangan yang bersumber dari banyak pihak, baik internal maupun eksternal sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Booth dan Ainscow, hambatan terhadap inklusi dapat muncul dalam bentuk sikap, kebijakan, maupun praktik yang menghambat partisipasi dan pembelajaran semua siswa. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sistem sekolah, tetapi juga dari resistensi sosial, termasuk pandangan orang tua yang belum sepenuhnya menerima keberagaman peserta didik [23]. Saat seseorang mendorong penerapan pendidikan yang lebih inklusif, mereka juga perlu menyadari tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini bisa datang dari berbagai pihak, seperti siswa, guru, orang tua, masyarakat, sekolah [28].

Implementasi kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 tidak lepas dari berbagai tantangan, salah satunya resistensi (tekanan) dari Orang tua siswa beberapa orang tua menunjukkan kekhawatiran atau ketidaksepakatan terhadap keberadaan siswa dengan kebutuhan khusus, terutama siswa dengan gangguan mental atau karakteristik yang berbeda. Padahal pada penerapan di kelas berdasarkan wawancara dari kepala sekolah dan guru, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Namun, sekolah tetap berpegang pada prinsip inklusi, dengan menekankan pentingnya mendukung setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya dengan memberikan pemahaman bagi orang tua siswa yang lain.

3.4. Evaluasi dan Dampak Kebijakan Inklusi

Evaluasi merupakan bagian integral dari proses manajemen pendidikan yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pembelajaran. Stufflebeam dalam model CIPP (Context, Input, Process, Product) menyatakan bahwa evaluasi bertujuan tidak hanya untuk menilai hasil, tetapi juga untuk memberikan informasi umpan balik yang berguna dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang efektif mampu memberikan motivasi, arahan, serta solusi atas kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan, sehingga program berjalan lebih terarah dan adaptif terhadap perubahan lapangan [29].

Evaluasi di SDIT Salsabila 3 secara kelembagaan dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan inklusi, termasuk kesesuaian pelaksanaan dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang pendidikan inklusif. Pada tingkat komunitas, evaluasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana pola pikir masyarakat, khususnya orang tua siswa, mengalami pergeseran dalam menerima kehadiran siswa ABK sebagai bagian dari komunitas belajar. Hal ini sejalan dengan teori evaluasi sosial yang menekankan pentingnya memahami dinamika sikap masyarakat terhadap penerima kebijakan [30]. Pendidikan inklusif membawa dampak positif yang besar bagi siswa ABK. Mereka mengalami kemajuan dalam pola belajar, kemampuan bersosialisasi, dan kemandirian. Melalui keikutsertaan dalam kelas inklusif, mereka merasa diterima dalam lingkungan yang suportif, yang berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri mereka [31].

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi di SDIT Salsabila 3 memberikan dampak positif, khususnya bagi siswa ABK. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, siswa ABK mengalami peningkatan yang signifikan dalam aspek kemandirian, kemampuan berinteraksi sosial, serta rasa percaya diri mereka di lingkungan sekolah. Selain perkembangan individu siswa, kebijakan inklusi juga berdampak pada terciptanya suasana sekolah yang hangat dan inklusif. Hasil observasi peneliti menunjukkan adanya hubungan yang erat dan penuh kekeluargaan antara guru, staf sekolah, dan wali murid. Hubungan ini tercermin, antara lain, dalam momen keseharian seperti saat penjemputan siswa, di mana para wali murid disambut dengan ramah dan diberikan salam oleh guru atau staf sebagai bentuk penghormatan dan keakraban. Interaksi yang positif ini memperkuat iklim sekolah yang suportif dan nyaman bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus.

Evaluasi di sekolah ini dilakukan melalui beberapa mekanisme formal dan informal. Dauroh Pekan atau forum mingguan digunakan sebagai ruang refleksi rutin antar guru dan staf untuk membahas dinamika pelaksanaan inklusi. Refleksi Semesteran dilakukan untuk mengevaluasi capaian dan hambatan selama satu semester penuh, sementara Monitoring Tahunan berfungsi sebagai evaluasi komprehensif untuk menyusun strategi pengembangan kebijakan ke depan. Pendekatan evaluatif ini menunjukkan bahwa SDIT Salsabila 3 tidak hanya menjalankan inklusi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai komitmen pedagogis yang terencana dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan menekankan penghargaan terhadap keberagaman dan potensi unik setiap individu. Penerapan pendidikan inklusif, seperti yang dilakukan di SDIT Salsabila 3 Banguntapan, menekankan pentingnya integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan belajar reguler. Hal ini Sesuai dengan prinsip

utama pendidikan inklusif yang ingin memastikan semua siswa bisa ikut belajar, terlibat aktif, dan mendapatkan hasil belajar yang adil tanpa membedakan kemampuan mereka.

Peran kepala sekolah dalam kebijakan ini sangat sentral, mencerminkan teori kepemimpinan transformasional yang mendorong perubahan melalui motivasi, fasilitasi, dan pemberdayaan. Kepala sekolah di SDIT Salsabila 3 berperan sebagai pionir, fasilitator, sekaligus pemimpin yang membuka ruang kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat. Meski menghadapi tantangan, seperti resistensi dari sebagian orang tua, kepemimpinan yang komunikatif dan transformatif mampu mengedepankan nilai inklusi dan keberlanjutan program.

Dampak positif dari implementasi kebijakan ini terlihat pada peningkatan kemampuan sosial, kemandirian, dan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus, sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif dalam membentuk lingkungan belajar yang ramah, suportif, dan tidak diskriminatif. Evaluasi dilakukan melalui forum mingguan, refleksi semesteran, dan monitoring tahunan, yang memperkuat keberlanjutan dan pengembangan kebijakan berbasis praktik reflektif.

Namun, studi ini memiliki keterbatasan, di antaranya ruang lingkup yang terbatas pada satu sekolah dan tidak menjangkau perspektif siswa atau orang tua secara lebih luas. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat deskriptif, sehingga analisis mendalam terhadap dinamika sosial-budaya di sekolah belum tergali secara utuh. Untuk pengembangan ke depan, sekolah lain dan pemangku kebijakan dapat menjadikan praktik di SDIT Salsabila 3 Banguntapan sebagai referensi dalam mengembangkan kebijakan inklusi yang kontekstual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi peran siswa dan orang tua, serta mengkaji secara komparatif praktik inklusi di berbagai jenis sekolah guna memperkaya literatur dan praktik pendidikan inklusi.

REFERENSI

- [1] R. Munajah, A. Marini, and M. S. Sumantri, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, vol. 5, no. 3, pp. 1183–1190, Apr. 2021, doi: 10.31004/basicedu.v5i3.886.
- [2] S. R. Kirschner, "TITLE: Inclusive Education."
- [3] D. W. C. Mulyani and Abidinsyah, "Strategi Pembelajaran Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SDN Antar Baru 1 Marabahan," vol. 7, no. 4, pp. 197–216, 2021.
- [4] U. N. I. Ni'mah, A. Elhady, and T. A. Mustofa, "Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Siswa Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Kelas Delapan," *Aulad : Journal on Early Childhood*, 2024.
- [5] "TITLE: Inclusive Education."
- [6] M. Sidik, "Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Lingkungan Belajar yang Inovatif," 2024.
- [7] P. Rahayu and A. Sunandar, "Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Variasi Pembelajaran Kooperatif," 2014. [Online]. Available: <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data->
- [8] S. N. Sari, Nurhajri, O. Andriani, and N. F. Wicaksono, "Problematika Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar," 2023.
- [9] Q. A. Salma, F. Najibah, and Zulfadewina, "Pendidikan Inklusi di SDN Ciracas Jakarta Timur: Tantangan dan Implementasi di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 2, no. 2, p. 20, Jan. 2025, doi: 10.47134/pgsd.v2i2.1373.
- [10] R. Pasaribu, U. Radiana, L. Wicaksana, and C. Dominico Panggoning Salarasati, "Peran Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 4 Jelai Hulu," *Manajemen Pendidikan*, vol. 18, no. 2, pp. 165–176, Dec. 2023, doi: 10.23917/jmp.v18i2.23289.
- [11] R. Rismita, C. Chairunnisa, I. Istaryatiningtias, and Y. Dwiputra, "Kekuatan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dalam Mengkoordinasikan Pendidikan Inklusif," *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, vol. 6, no. 5, pp. 5980–5990, Aug. 2024, doi: 10.31004/edukatif.v6i5.7638.
- [12] D. Fuaddah, R. Ambarwati, rifatul Afidah, K. Nila Rusiana, T. Indah Jati, and T. Fathoni, "Social Science Academic Kepemimpinan Inklusif Kepala Sekolah Dalam Menjaga Kerukunan Dan Moderasi Beragama Di Sekolah," vol. 3, no. 1, 2025, doi: 10.37680/ssa.v3i1.6299.
- [13] S. Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. 2021. [Online]. Available: www.penerbitbukumurah.com
- [14] N. Naamy, "Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya," 2019.
- [15] A. dkk. Sari, "Dasar-dasar Metodologi Penelitian," 2023.
- [16] A. Hardani MSi, J. Ustiawaty, and D. Juliana Sukmana, "Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif," 2020. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- [17] H. Baharun and R. Awwaliyah, "Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, vol. 5, no. 1, 2018.
- [18] D. Arianto, "Pandangan Islam terhadap Pendidikan Inklusif," 2022. [Online]. Available: <https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/>
- [19] S. Trihariyanto, E. Supriyanto, Muthoifin, and Z. Uyun, "Strategi Pembelajaran Inovatif Pendidikan Agama Islam dengan Media Powerpoint dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas dan SD Muhammadiyah PK Bayat," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 21, no. 1, pp. 109–120, Jul. 2020, doi: 10.23917/profetika.v21i1.11653.

- [20] R. Pasaribu, U. Radiana, L. Wicaksana, C. Dominico, and P. Salarasati, "Peran Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 4 Jelai Hulu," *Manajemen Pendidikan*, vol. 18, no. 2, pp. 165–176, Dec. 2023, doi: 10.23917/jmp.v18i2.23289.
- [21] S. Bahri, "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 94–100, Nov. 2021, doi: 10.31004/edukatif.v4i1.1754.
- [22] L. L. Y. Lalak Muslimin and M. Muqowim, "Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, vol. 7, no. 3, p. 708, Sep. 2021, doi: 10.33394/jk.v7i3.3468.
- [23] T. Booth and M. Ainscow, *Index for inclusion developing learning and participation in schools*. Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), 2002.
- [24] Samsilayurni, "Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Dan Manajer Sekolah," *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*, 2022.
- [25] A. Dzaky, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator pada MA Muhammadiyah 1 Banjarmasin," 2016.
- [26] R. Saputro Sekolah Vokasi, "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan OCB terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi," vol. 9, no. 2, pp. 1103–1120, 2021.
- [27] C. Glickman, "Developing a Super-Vision of Education: Oh, No. I've Said Too Much, But Maybe I Haven't Said Enough," *Journal of Educational Supervision*, vol. 4, no. 3, Sep. 2021, doi: 10.31045/jes.4.3.6.
- [28] A. Andriyan, W. Hendriani, and P. P. Paramita, "Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya," *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, vol. 5, no. 2, p. 94, Nov. 2023, doi: 10.26555/jptp.v5i2.25076.
- [29] Stufflebeam, *SYSTEMATIC EVALUATION*. Kluwer: Nijhoff Publishing, 1985.
- [30] Y. Hananto and D. Lituhayu, "Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif jenjang SMP di Kota Pekalongan," 2018. [Online]. Available: www.bpdiksus.org
- [31] I. Suryadi, "Dampak Pendidikan Inklusif Terhadap Partisipasi dan Prestasi Siswa dengan Kebutuhan Khusus," 2023.